



JCW Laporkan Pengelolaan RTH TB Simatupang

Cilandak, Warta Kota

Jakarta Corruption Watch (JCW) melaporkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dugaan penyelewengan anggaran pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/5).

JCW menilai anggaran pengelolaan RTH itu tidak mencapai Rp 1 miliar. "RTH yang kami laporkan adalah RTH yang berada di bawah *flyover* Lebak Bulus di Jalan TB Simatupang," kata Manat Gultom, Koordinator JCW, Senin (18/5).

Laporan itu, kata Manat, sudah masuk ke Kejari Jakarta Selatan sesuai pelaporan Nomor 915/LSM JCW/V/2015 tertanggal Senin (18/5).

Tidak ada anggaran pengelolaan RTH yang mencapai angka sebesar itu.

M Fajar

Manat mengatakan, dengan anggaran Rp 957 juta, seharusnya jalur hijau di Jalan TB Simatupang bisa lebih baik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DKI Jakarta 2014, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mencantumkan

pagu pekerjaan RTH di Jalan TB Simatupang sebesar Rp 957.725.000. "Padahal, pekerjaannya meliputi pekerjaan penanaman pulau-pulau berikut pengolahan penggemburan tanah, serta penanaman jenis tanaman perdu, rumput gajah, dengan tanaman hias lainnya," kata Manat.

Ini, lanjut Manat, menunjukkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan alokasi anggaran berdasar proyek kepentingan. Lebih lanjut Manat menjelaskan, penyediaan satu jenis item pekerjaan hanya memerlukan pembiayaan Rp 19.725.000. Sedangkan empat pekerjaan penanaman pulau-pulau dengan bingkai tanaman berikut tanaman eksisting diperkirakan hanya mencapai Rp 250 juta. Jadi tidak sampai Rp 1 miliar.

JCW juga menilai ada un-

sur dugaan penggelembungan harga barang dari nilai kontrak. Hal ini dilihat dari jenis kegiatan secara 50 persen adalah tidak dilaksanakan alias difiktifkan oleh jajaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Bantah

Sementara, Kepala Bidang abid Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, M Fajar, membantah bahwa pengelolaan RTH di Jalan TB Simatupang mencapai angka hampir Rp 1 miliar. "Tidak ada anggaran pengelolaan RTH yang mencapai angka sebesar itu. Dalam APBDP 2014, tidak ada anggaran pengelolaan RTH di Jalan TB Simatupang hingga Rp 1 miliar. Maaf, sejauh saya tidak ada," ungkap Fajar. **(bin)**